

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	9
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	10

1.5.3	Sumber Bahan Hukum	11
1.5.5	Analisis Bahan Hukum	13
1.6	Pertanggungjawaban Sistematis.....	13
BAB II URGENSI KEPEMILIKAN STATUS KEWARGANEGARAAN		
BAGI <i>STATELESS PERSON</i> EKS DAN KETURUNAN WNI DI		
FILIPINA		
		15
2.1	Kedudukan Warga Negara di Indonesia.....	15
2.2	Status Kewarganegaraan sebagai HAM.....	26
2.2.1	Hak atas Status Kewarganegaraan dalam Hukum Internasional... 26	
2.2.2	Hak atas Status Kewarganegaraan dalam Hukum Nasional.....	32
2.2.3	Konsep Hak Atas Status Kewarganegaraan Berdasarkan Prinsip HAM.....	35
BAB III UPAYA PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN DAN		
PEMENUHAN HAK ATAS STATUS KEWARGANEGARAAN PADA		
<i>STATELESS PERSON</i> EKS DAN KETURUNAN WNI DI FILIPINA ..		
		41
3.1	Konsep Lahirnya Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanganan <i>Stateless Person</i> Eks dan keturunan WNI di Filipina	41
3.2	Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Status Kewarganegaraan menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	50
3.2.1	Perlindungan Hak atas Status Kewarganegaraan.....	50
3.2.2	Pemenuhan Hak atas Status Kewarganegaraan.....	53

3.3 Pewarganegaraan pada <i>Stateless Person</i> Eks dan Keturunan WNI di Filipina.....	61
BAB IV PENUTUP	72
4.1 Kesimpulan.....	72
4.2 Saran.....	73
DAFTAR BACAAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan regulasi tentang kehilangan status kewarganegaraan karena bertempat tinggal di luar negeri tanpa memberikan laporan dalam UU No. 68 Tahun 1952 dengan UU No. 12 Tahun 200648

Tabel 2. Klasifikasi mekanisme perolehan status kewarganegaraan berdasarkan sistem aktif dan pasif58

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676)

Konvensi dan Perjanjian Internasional

Universal Declaration of Human Rights

International Covenant on Civil and Political Rights

Convention on the Reduction of Statelessness